

**RAPAT KERJA**  
**LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**BOGOR, 7-8 MEI 1991**

**RLPM - IV**

**PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**FAKULTAS PERTANIAN IPB**  
**1991 - 1995**

**Oleh:**  
**PEMBANTU DEKAN I**  
**FAKULTAS PERTANIAN IPB**



**LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**1991**

**PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN IPB  
1991-1995 <sup>1)</sup>**

Oleh:

**HIDAYAT SYARIEF <sup>2)</sup>**

**LATAR BELAKANG**

Sumberdaya manusia, bidang keilmuan dan berbagai perangkat yang dikelola oleh lima jurusan yang bernaung pada Fakultas Pertanian merupakan modal dasar bagi penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat (PPM) yang dapat berdayaguna bagi keberhasilan pembangunan pertanian secara holistik. Hasil kegiatan PPM serta temuan permasalahan di lapang dapat diolah lebih lanjut guna menelorkan berbagai gagasan monumental dan masukan bagi perumusan kebijakan dan program pembangunan. Kegiatan PPM juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna yang berkiprah dalam sektor swasta. Selain itu, program PPM yang diselenggarakan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan dan pengembangan dharma pendidikan dan penelitian. Sasaran kegiatan PPM tidak hanya terbatas pada tingkat lokal atau nasional. Berbagai bentuk dan jenis pelatihan sudah mampu kita arahkan kepada kelompok sasaran regional dan internasional.

Kehadiran Undang-Undang Pokok Pendidikan No. 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 memberi nuansa baru bagi Fakultas Pertanian dan IPB secara keseluruhan untuk dapat secara mandiri mendaya-gunakan sumberdaya sendiri dalam menyelenggarakan program PPM yang bermanfaat ganda. Mengacu kepada kedua landasan hukum itu, berikut modal dasar yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian IPB perlu dirumuskan jenis dan mekanisme penyelenggaraan PPM yang mampu menciptakan iklim yang kondusif guna merangsang munculnya gagasan-gagasan monumental dan program-program yang aktual dari IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi pertanian yang bergengsi di tingkat nasional dan bahkan di tingkat regional dan internasional. Sistem kelembagaan berikut ketentuan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat secara nasional masih perlu disempurnakan.

- 
- 1) Disampaikan dalam Rapat Kerja Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, tanggal 7-8 Mei 1991.
  - 2) Pembantu Dekan I Fakultas Pertanian IPB

**KERANGKA PEMIKIRAN**

Kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Indonesia yang bersifat agraris menuntut perlunya pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengisyaratkan bahwa pembangunan nasional akan dikembangkan menuju struktur ekonomi yang seimbang antara sektor industri yang kuat dengan dukungan sektor pertanian yang tangguh. Sejalan dengan itu, pembangunan pertanian diarahkan pada usaha untuk meningkatkan produksi, meningkatkan penghasilan petani, memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan perbaikan gizi masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan pengembangan ekspor komoditas non-migas.

Gagasan monumental yang diciptakan IPB pada awal tahun 1960-an berupa konsep Bimas telah membawa negara kita ke tarap swasembada beras pada tahun 1984. Dalam era pasca-swasembada ini, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian Indonesia. Usaha peningkatan dan pengamanan produksi pangan harus berpacu dengan kenaikan kebutuhan konsumsi sebagai akibat peningkatan penduduk yang masih cukup tinggi yang juga diikuti dengan peningkatan pendapatan dan perubahan pola konsumsi. Penurunan devisa asal minyak bumi menuntut adanya peningkatan ekspor komoditas pertanian guna mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Sumberdaya pertanian sebagai sumberdaya terpulihkan (renewable resources) yang tersedia secara beragam di tanah air kita mempunyai keunggulan komparatif (comparative advantage) sehingga merupakan alternatif yang lebih menjanjikan. Oleh karena itu, perlu dirancang berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan produksi komoditas ekspor pertanian, menjaga dan meningkatkan mutu komoditas, meningkatkan efisiensi produksi sehingga mampu menjawab berbagai tantangan global dengan tetap mempertimbangkan peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Disamping itu, pembangunan pertanian harus berperan pula dalam usaha untuk mengurangi beban impor sehingga selain akan mempunyai dampak penghematan devisa, juga akan mengurangi ketergantungan secara ekonomi maupun politik dari negara lain.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, potensi sumberdaya lahan, sumberdaya hayati dan sumberdaya manusia yang cukup besar harus didayagunakan secara optimal dengan tetap mendasarkan diri pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Kendala teknis yang dihadapi antara lain tingkat kesuburan lahan yang beragam dan distribusi penduduk yang kurang merata antar wilayah menyebabkan potensi lahan yang ada terutama di luar Jawa masih belum didayagunakan secara optimal untuk usaha pertanian. Di lain pihak, lahan pertanian di Jawa semakin menyempit karena desakan tingginya jumlah penduduk dan peningkatan volume pembangunan sektor non pertanian. Lahan-





